



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 19/01/2025
 Reviewed : 22/01/2025
 Accepted : 21/01/2025
 Published : 28/01/2025

Ayu Raudah Zamzam¹
 Nurfadhilah Ahmad
 Hasibuan²

TINJAUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN (SIP) DIREKTORAT JENDERAL SUMATERA UTARA MEDAN

Abstrak

Penilaian di Indonesia terus mengalami perkembangan dan penyesuaian teknologi. Kemudahan dalam melakukan penilaian semakin dibutuhkan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi. Sistem Informasi Penilaian dibuat untuk memudahkan penilai dalam melakukan penilaian. Untuk itu, dilakukan penelitian terkait penggunaan, manfaat, dan permasalahan Sistem Informasi Penilaian. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, penggunaan Sistem Informasi Penilaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara digunakan oleh penilai dalam pelaksanaan penilaian dan administrasi. Dalam penggunaan, beberapa masalah terjadi terkait menu di dalamnya. Secara garis besar, Sistem Informasi Penilaian telah membantu penilai untuk memfasilitasi pelaksanaan penilaian

Kata Kunci: Penilaian, Sistem Informasi, Menu

Abstract

Assessment in Indonesia continues to experience technological developments and adjustments. Ease of carrying out assessments is increasingly needed in connection with current developments. The Assessment Information System was created to make it easier for assessors to carry out assessments. For this reason, research was conducted regarding the use, benefits and problems of the Assessment Information System. Research was carried out using literature studies, interviews and observations. From the research that has been carried out, the use of the Appraisal Information System within the Directorate General of State Assets is used by appraisers in the implementation of appraisals and administration. During use, several problems occurred regarding the menu in it. In general, the Assessment Information System has helped appraisers to facilitate the implementation of assessments

Keywords: Assessment, Information System, Menu

PENDAHULUAN

Di Indonesia, penilaian aset sudah dikenal sejak zaman kolonial. Pada saat itu, penilaian tersebut dikenal sebagai istilah klasifikasi. Profesinya dikenal sebagai klasifikasi mantri. Saat itu, penilaian ditujukan untuk perpajakan. Saat ini penilaian aset telah berkembang. Di sektor swasta, terdapat asesor dari Professional Society Indonesian Appraiser (MAPPI). Sementara itu, di sektor publik, terdapat asesor internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dua lembaga atau organisasi menjadi fondasi penilaian aset pembangunan di Indonesia.

Perkembangan penilaian aset di Indonesia mengikuti fluktuasi jumlah permintaan atau permintaan penilaian. Pada tahun 2010, jumlah permohonan penilaian di Kantor Pusat adalah 74 lembar yang terdiri dari 65 permohonan penilaian untuk Pengalihan dan 9 Permintaan Penilaian dalam rangka pemanfaatan. Jumlah tersebut bertambah menjadi 95 aplikasi penilaian pada tahun 2013 di mana 61 aplikasi diminta adalah aplikasi untuk penilaian dalam rangka transfer.

Sementara itu, jumlah laporan penilaian yang mengalami pertumbuhan, terutama di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Layanan State Wealth and Auctions. Pada tahun 2010, jumlah laporan penilaian yang dihasilkan adalah 2081 Laporan terdiri dari 554 laporan terkait

^{1,2}Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
 email: ayuzamzam8@gmail.com, fadhilahahmad@uinsu.ac.id

Pemanfaatan dan 1527 laporan terkait transfer.

Jumlah ini memang turun pada tahun 2011 dan 2012, tetapi kembali meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2014, jumlah laporan Hasil penilaian mencapai 11.524 laporan. Dari semua laporan penilaian yang dihasilkan, DJKN melakukan review terhadap sejumlah laporan penilaian. Secara umum, jumlah laporan penilaian yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah laporan penilaian yang ditinjau adalah jumlah 285 laporan. Jumlahnya turun menjadi 4 laporan pada tahun 2011. Kemudian terus meningkat hingga tahun 2014

Pada tahun 2014, jumlah laporan penilaian yang ditinjau adalah 646. Meski meningkat, jumlah laporan penilaian yang ditinjau pada tahun 2014 mengalami penurunan dari segi persentase dari total jumlah laporan penilaian, yaitu 5,6% dari sebelumnya 26,5% pada tahun 2013. Perkembangan yang telah terjadi di dunia asesmen di Indonesia harus direspon dengan berinovasi untuk meningkatkan standar dan kualitas asesor serta hasil asesmen yang dilakukan.

Inovasi yang dilakukan harus mampu menyelesaikan perkembangan yang telah terjadi di dunia asesmen di Indonesia harus direspon dengan berinovasi untuk meningkatkan standar dan kualitas asesor serta hasil asesmen yang dilakukan. Inovasi yang dilakukan harus mampu memecahkan masalah yang belum pernah ditangani sebelumnya. Hal ini tentu membutuhkan proses untuk menjadi sempurna. Oleh karena itu, inovasi yang dilakukan harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar dapat memenuhi target inovasi dalam memecahkan permasalahan terkait asesmen. Salah satu inovasi yang dilakukan DJKN adalah membuat database penilaian. Basis data penilaian diwujudkan dalam sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Penilaian (SIP). Di era industri 4.0, sistem informasi adalah sangat penting dalam konteks efisiensi suatu bisnis atau proses produksi.

Sehubungan dengan proses penilaian, penggunaan SIP memiliki manfaat yang memungkinkan penilaian dapat dilakukan lebih cepat dan lebih terkendali dengan memfasilitasi proses administrasi penilaian dan penyelesaian proses penilaian itu sendiri. Penggunaan SIP tentu juga mengalami beberapa masalah yang menghambat atau mengurangi potensi penggunaan SIP itu sendiri. Manfaat dan permasalahan yang terjadi dalam penggunaan SIP dapat dilihat dari persepsi para penilai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pengguna SIP. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penggunaan SIP, manfaat penggunaan SIP, dan permasalahan yang terjadi dalam penggunaan SIP serta untuk mengetahui persepsi penilai terhadap SIP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui penggunaan Direktorat Jenderal Sistem Informasi Penilaian Aset Negara beserta manfaat dan permasalahan dalam penggunaannya, dilengkapi dengan persepsi penilai terhadap SIP itu sendiri.

METODE

Data adalah bahan bakar dalam sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian penelitian, ada berbagai metode yang dapat digunakan. Metode yang akan digunakan penulis dalam proses penyelesaian

Penelitian adalah metode penelitian perpustakaan dan metode penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dan observasi. Penelitian Perpustakaan Penelitian dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan ditulis, seperti peraturan terkait penilaian dan DJKN, manual penggunaan Sistem Informasi Asesmen DJKN untuk Bidang/Seksi Asesmen Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL, dan rencana strategis (renstra) Direktorat Asesmen DJKN tahun 2015-2019. Menjelaskan ruang lingkup dan/atau keterbatasan metodologi yang Anda gunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, menu "informasi penilaian" dapat digunakan oleh pengguna untuk mencari informasi terkait penilaian, pemantauan penilaian, dan pendampingan administrasi pelaporan bulanan. Beberapa informasi yang dapat diakses melalui menu "Informasi Penilaian" adalah informasi laporan asesmen yang kedaluwarsa/belum kedaluwarsa, informasi harga tanah,

informasi asesmen yang sedang berlangsung atau selesai, informasi asesmen ulang, informasi data komparatif, informasi objek, dan informasi pengajuan penilaian. Untuk administrasi pelaporan bulanan, menu digunakan untuk Informasi penilaian dapat diperoleh dengan mengakses submenu tertentu. Submenu "Pencarian Laporan Kedaluwarsa/Belum Kedaluwarsa" digunakan untuk mengakses daftar laporan penilaian dari tanggal penilaian tertentu hingga tanggal kedaluwarsa laporan, mengakses detail laporan penilaian, dan mengatur pengingat masa berlaku laporan penilaian. Submenu "Informasi Harga Tanah" digunakan untuk mengakses informasi harga tanah tim penilai yang relevan. Sub-menu "Informasi Data Komparatif" digunakan untuk mengakses informasi data komparatif yang berasal dari laporan penilaian. Sub menu "informasi objek spesifik" digunakan untuk mencari data pada objek penilaian tertentu dan objek komparatifnya. Submenu "informasi objek global" digunakan untuk mencari data pada objek penilaian tertentu dan mengunduh data tersebut ke komputer pengguna. Submenu "Informasi Geotagging" digunakan untuk mencari objek komparatif dalam radius tertentu dari objek penilaian.

Pemantauan permintaan penilaian Menu "Informasi Penilaian" dibagi menjadi dua. Pertama, pemantauan penilaian yang sedang berlangsung. Pemantauan ini dilakukan dengan mengakses submenu "Monitoring Permintaan Penilaian (masih dalam proses)". Kedua, pemantauan penilaian yang telah selesai. Pemantauan ini dilakukan dengan mengakses submenu "Monitoring Permintaan Penilaian (proses selesai)". Pemantauan permintaan penilaian juga dapat dilakukan dengan submenu "permintaan penilaian". Berbeda dengan dua submenu sebelumnya, submenu ini menampilkan semua data penilaian melalui alat pencarian berdasarkan unit kerja penerima, lembaga, eselon I atau unit kerja pemohon penilaian, tanggal permohonan dan objek penilaian. Dokumen laporan rutin bulanan dicetak menggunakan submenu "cetak laporan rutin". Laporan rutin bulanan dicetak sesuai dengan format KEP-157/KN/2013 tentang Standardisasi Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pencetakan laporan rutin tersebut dapat dilakukan berdasarkan bulan laporan penilaian, jenis laporan, kantor wilayah, dan KPKNL terkait. Laporan rutin yang dicetak akan dibentuk dalam bentuk excel.

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan penggunaan Sistem Informasi Penilaian (SIP) di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem:

Peningkatan Infrastruktur Teknologi: DJKN perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang mendukung SIP selalu diperbarui dan mampu menangani beban kerja yang terus meningkat. Ini termasuk meningkatkan jaringan internet dan perangkat keras yang digunakan.

Pelatihan Pengguna: Melakukan pelatihan rutin bagi pengguna SIP untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis dan prosedural untuk memastikan bahwa semua karyawan dapat memanfaatkan sistem secara optimal.

Peningkatan Antarmuka Pengguna: Melakukan evaluasi dan peningkatan pada antarmuka pengguna SIP agar lebih intuitif dan mudah digunakan. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi kesalahan dalam input data.

Memperkuat Proses Manajemen Risiko: DJKN harus mengembangkan manajemen risiko khusus untuk TI, sehingga risiko yang terkait dengan penggunaan SIP dapat diidentifikasi, dinilai, dan dimitigasi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Appraisal Institute. 2013. *The Appraisal of Real Estate* 14th Edition. Illinois: Appraisal Institute. C. Laudon, P. Jane Laudon, Kenneth. 2006. *Management Information System*. Harlow: Pearson

- Jogiyanto, HM. 1995. Pengenalan Komputer. Yogyakarta: Andi Affset Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia. 2018. Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018. Jakarta: Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia
- Kusnendi. t.t. "Modul 1: Konsep Dasar Sistem Informasi". Dalam Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan, 1-10. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Simon, JC. 2000. Introduction to Information Systems. New Jersey: Wiley
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2014. Panduan Penggunaan Sistem Informasi Penilaian User Bidang dan Seksi Penilaian Lingkup Kanwil dan KPKNL DJKN. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri
- Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.